



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
" HARTA SWADIRI "**

Komplek Pertokoan Chandra Sukun Unit I Jl. Dr. Soetomo Pandaan – Pasuruan
Telp. (0343) 634894 Email : hartaswadiri@gmail.com

Pandaan, 30 Januari 2025

Nomor : 12/SKL/01/BPR.HS/I/2025
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth,

DPP Perbarindo dan Media BPR
"KOMP. PATRA II NO. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,
Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10510"
di –

Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2024

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

Dengan ini kami sampaikan Bukti Laporan Penerapan Tata Kelola *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR "HartaSwadiri" tahun 2024 Via Perbarindo Online.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi periksa dan kami ucapkan terima kasih.


Ujan Bagi Arta, S.Kom,
Direktur Utama

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR HARTA SWADIRI
TAHUN 2024**



**Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan
Pasuruan
TELEPON: (0343) 634894**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR HARTA SWADIRI
Alamat	Ruko Chandra Sukun Unit 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
Nomor Telepon	(0343) 634894

Penjelasan Umum:

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sangat dibutuhkan BPR dalam meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan semakin beratnya persaingan usaha industri perbankan khususnya BPR, risiko yang dihadapi BPR juga semakin kompleks. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SEOJK 12- SEOJK.03 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Perubahan Atas SEOJK No. 24/ SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Harta Swadiri berkomitmen untuk berusaha meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik dan berusaha secara konsisten menjaga integritas seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Akuntability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) dalam seluruh aktivitas usaha BPR Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik diharapkan BPR dapat terus mempertahankan bisnisnya secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya dalam menjaga kepercayaan para stakeholders. BPR secara bertahap telah memenuhi faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola yang baik. Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal, BPR selalu berupaya memperbaiki dan menyempurnakannya secara bertahap dan konsisten

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelamahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola, secara umum kelamahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
---------	-----------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
- f. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2.

Nama

Laskar Aron Yuliono, SE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Bersama- sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan manajemen Bank, perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan serta pengawasan dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Direksi wajib mengawasi secara rutin masalah pendanaan guna memastikan penggunaan secara efektif, keseimbangan likwiditas, dan profitabilitas.
- c. Meneliti, membahas, menanggapi, dan menindaklanjuti kritik dan saran baik dari pengurus/ komisaris/ unit internal control, auditor ekstern (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Instansi Pemerintah maupun dari para nasabah sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan memformulasikan tindakan preventif serta perbaikan- perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
- d. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain.
- e. Memantau kinerja bidang kepatuhan dalam tugas sehari- hari nya dan dalam hal pelaporannya, agar kinerja operasional BPR secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh Bank Indonesia, OJK maupun instansi terkait lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas SDM utamanya dibidang marketing untuk meningkatkan penjualan produk bank serta membangun SDM yang unggul di era digital.

- b. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan sangat selektif yang terfokus pada pembiayaan kredit mikro (plafond dibawah 50jt).
- c. Mempertahankan atau mengendalikan Non Performing Loan (NPL) dengan meningkatkan kualitas portofolio kredit.
- d. Terus melakukan penagihan kredit bermasalah serta mengupayakan penyelesaian AYDA.

Jumlah Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 2 (dua) Orang sesuai dengan Akta no 03 tanggal 24 April 2024 dan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (OJK).

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya. c. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB). d. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakit dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK. e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas lainnya. 	
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya. c. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB). d. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakit dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam 	

Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK.
 e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Mempertahankan TKS (Tingkat Kesehatan Bank) dalam posisi Sehat.
- b. Memastikan penerapan APU-PPT berjalan dengan baik.
- c. Menindaklanjuti temua pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan baik Audit Intern maupun Akuntan Publik.

Persyaratan berupa jumlah atau komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi minimal (dua) orang dan tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

-

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

-

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Persentase Kepemilikan (%)	0,25
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	28,20
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Persentase Kepemilikan (%)	7,50

Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK, sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/ atau perusahaan lain. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Trimulyo
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	41,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	41,50
2.	Nama	Wahudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
3.	Nama	Sunyono
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	11,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	11,00
4.	Nama	Mujiadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	11,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	11,00
5.	Nama	Ragilia Dwi Indah Sari
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	38,27
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	38,27
6.	Nama	Wahudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	3,76
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,76
7.	Nama	Sunyono
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	8,33
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,33
8.	Nama	Mujiadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	7,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	7,58

-

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE

	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Danaputra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	41,50
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direski tidak mempunyai Saham pada Perusahaan lain.
 Semua anggota Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemengan Saham.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji	Rp304.000.000

Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp252.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp10.642.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp5.500.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp103.425.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp66.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
--	---------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,77 : 1

-

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	16 Januari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024.		
2.	Tanggal Rapat	12 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank.		
3.	Tanggal Rapat	13 Juli 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan tentang POJK Nomor 09 Tahun 2024.		
4.	Tanggal Rapat	11 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank, Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Pembahasan terkait Penggabungan dan Peleburan dengan PT BPR Danaputra Sakti.		

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris. Rapat berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana kerja. Dalam risalan rapat diketahui bahwa pengambilan keputusan selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dengan mengedepankan kepentingan Bank.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Trimulyo, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sudirman, S,Sos
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

-

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	---------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	---------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Berdasarkan hasil pengawasan kegiatan operasional tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan. Hal ini dapat dicegah karena Bank selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang cukup sesuai dengan ketentuan dan kemampuan bank untuk seluruh karyawan, menjaga kualitas SDM dengan mengikutkan pelatihan- pelatihan baik internal maupun eksternal serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan, sistem, prosedur dan pengendalian intern Laporan Good Corporate Governance (GCG) yang disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang baru sehingga dapat terhindar adanya potensi risiko operasional.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian

Tidak ada permasalahan Hukum selama Tahun 2024 yang dihadapi pada PT. BPR Harta Swadiri.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak terkait dengan BPR.

Berdasarkan hasil evaluasi Bank pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi atau benturan kepentingan, Anggota Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dikarenakan dalam Operasional Bank berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	26 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bantuan anak yatim dan dhuafa
	Penjelasan Kegiatan	-
	Jumlah (Rp)	Rp1.560.000

Pemberian dana BPR untuk kegiatan sosial.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR HARTA SWADIRI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pandaan, 30 Januari 2025

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui


Firmulyo, SE
Komisaris Utama



Ufan Bagi Arta, S.Kom
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT
BPR HARTA SWADIRI Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR HARTA SWADIRI selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pandaan, 30 Januari 2025

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui,


Trimulyo, SE
Komisaris Utama


Ulan Bagi Arta, S.Kom
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Swadiri

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798716-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601696-31012025192231

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

hartaswadiri@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 19:22:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.